

SUDAN SELATAN PASCA MERDEKA (2011-2014)

Oleh:
David Chandra P
NIM. 11406241032

ABSTRAK

Perjuangan Negara Sudan Selatan untuk merdeka memerlukan waktu puluhan tahun, akan tetapi titik balik kebangkitan penduduk Sudan Selatan dimulai pada tahun 2005. Penelitian ini bertujuan untuk (1) memberikan gambaran singkat tentang kondisi geografis dan kebudayaan di Sudan Selatan, (2) mendeskripsikan proses berdirinya negara Sudan Selatan, (3) mendeskripsikan kondisi Sudan Selatan setelah merdeka yang terdiri dari pendidikan, kondisi perempuan, pembangunan, hingga perang antar suku di Sudan Selatan.

Penelitian skripsi ini menggunakan metode sejarah kritis menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima langkah, yaitu: (1) *pemilihan topik*, merupakan penentuan masalah, (2) *heuristik*, yaitu pengumpulan sumber, (3) *verifikasi*, yakni mengkritik sumber sejarah, (4) *interpretasi*, merupakan penafsiran terhadap fakta sejarah, (5), *historiografi*, yaitu penelitian sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan, (1) Bahasa Inggris diakui sebagai bahasa nasional walaupun beberapa penduduk di wilayah pedesaan masih menggunakan bahasa pribumi mereka serta mayoritas penduduk Sudan Selatan memeluk agama Kristen dengan agama Islam sebagai minoritas. (2) Pelaksanaan CPA masih belum maksimal, terbukti dengan masih adanya konflik antara pemerintah Sudan dengan SPLM/A, walaupun begitu penduduk Sudan Selatan tetap mampu melaksanakan referendum yang dimulai pada tanggal 9 Januari 2011 dan berakhir pada kemerdekaan Sudan Selatan pada tanggal 9 Juli 2011 dengan jumlah 98,83% penduduk Sudan Selatan memilih untuk memisahkan diri dari pemerintah Sudan. (3) Kondisi pendidikan dan perempuan di Sudan Selatan masih sangat memprihatinkan dan masih sangat tertinggal dari negara lain. Kasus pemerkosaan dan tingkat kekerasan seksual masih sangat tinggi di negara tersebut. Pembangunan dan perbaikan dari semua sektor harus berhenti akibat meletusnya perang antar suku yang dipicu perbedaan pandangan politik antara Presiden Salva Kiir dengan mantan Wakil Presiden Riek Machar. Konflik antar suku berdampak buruk pada perekonomian dan kesehatan penduduk di Sudan Selatan. (4) Pembangunan di Sudan Selatan tidak terlepas dari peran negara Cina. Bantuan Cina terletak kepada tiga bidang yaitu ekonomi, infrastruktur dan pendidikan. Perekonomian Sudan Selatan sangat bergantung pada produksi minyak.

Kata Kunci: *Sudan Selatan, Pasca Merdeka, 2011-2014.*

THE STRUGGLE OF SOUTH SUDAN AFTER THE INDEPENDENCE

(2011-2014)

David Chandra P.

NIM 11446241032

ABSTRACT

The struggle of South Sudan for the independence took tens of years, but the turning point of the awakening of the people of South Sudan started in 2005. This study aimed to describe: (1) the geographical conditions and culture of South Sudan briefly, (2) describe the process of the establishment of South Sudan, and (3) the conditions of South Sudan after the independence in terms of education, women's conditions, development, and inter-tribal wars in South Sudan.

This undergraduate thesis used the critical historical method according to Kuntowijoyo, consisting of five steps, namely: (1) topic selection to determine the problem, (2) heuristics to collect sources, (3) verification to criticize historical sources, (4) interpretation to interpret historical facts, and (5) historiography to write the history.

The results of the study were as follows. (1) The English language was acknowledged as a national language although people in villages still used their indigenous languages and the majority of the people of South Sudan were Christians and the minority of them were Moslems. (2) The implementation of CPA was not maximal, indicated by conflicts between Sudan's government and SPLM/A. However, the people of South Sudan were able to hold a referendum on 9 January 2011 and it resulted in the independence of South Sudan on 9 July 2011 with 98.83% of the people of South Sudan choosing to separate themselves of Sudan's government. (3) The conditions of education and women in South Sudan were still very alarming and much lagged behind other countries. Cases of rape and sexual violence levels were still very high in the country. Development and improvement of all sectors had to be halted due to the outbreak of inter-tribal wars triggered by political differences between President Salva Kiir with former Vice President Riek Machar. Inter-tribal conflicts had a negative impact on the economy and health of the people of South Sudan. (4) The development in South Sudan could not be separated from the role of China. Chinese aids were for three sectors, namely economy, infrastructure, and education. South Sudan's economy relied heavily on petroleum production.

Keywords: *South Sudan, after the independence, 2011-2014*

A. Pendahuluan

Sudan adalah negara terbesar di benua Afrika dengan luas hampir satu jutamil persegi.¹ Negara luas di Afrika yang mempunyai keragaman suku, ras dan agama. Keragaman yang seharusnya menjadi penyeimbang dan harmoni yang kuat berubah menjadi suatu masalah dan petaka yang berkepanjangan bagi wilayah bekas jajahan Inggris ini. Pendudukan Inggris terhadap Sudan berdampak panjang pada perjalanan sejarah bangsa ini.

Pemerintahan kolonial Inggris di Sudan berlangsung lama, hingga akhirnya Sudan memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1956. Setelah merdeka, isu tentang status dan masa depan Islam tetap merupakan agenda politik, baik bagi kelompok maupun individu yang berupaya memperjuangkan negara sekuler, multinasional, multireligius untuk mengakhiri perang saudara antara utara dan selatan yang pecah setelah Sudan merdeka.²

Pengelompokan antara Sudan bagian utara dan selatan yang berlatar belakang ras dan agama yang berbeda menjadi titik awal dimulainya pertikaian dan ketegangan yang menjadikan Sudan selama beberapa waktu terakhir ini dilanda konflik berkepanjangan.³ Penduduk dari wilayah selatan sering kali tidak dilibatkan dalam sistem pemerintahan dan pengambilan kegiatan politik.

Perang sipil pertama terjadi pada tahun 1955 sampai dengan tahun 1972. Perang sipil yang pertama disebabkan karena pemerintahan yang berada di utara lebih didominasi oleh penduduk dari Sudan bagian utara. Perang sipil pertama antara utara dan selatan sempat terhenti beberapa waktu setelah dikeluarkannya perjanjian Addis Ababa. Perjanjian Addis Ababa, dinegosiasikan pada bulan februari 1972 antara GoS dan SPLM/A.⁴ Suatu perjanjian penghentian perang yang dikesepakati oleh kedua belah pihak. Ideologi politik Sudan mengalami perubahan pada masa kepemimpinan Presiden Jafaar Muhammad An-Numeiry setelah disepakatinya persetujuan Addis Ababa.⁵ Persetujuan yang ditanda tangani tahun 1972 ini berisi kewenangan bagi Sudan bagian

¹ Michelle Bison. *Culture of the world Sudan*. Tarrytown: Marshall Gavendish, 1977, hlm. 7.

² Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: IKAPI, 2004, hlm. 114.

³ Konflik adalah bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok yang berbeda etnik (suku bangsa, ras, agama dan golongan) karena diantara mereka memiliki perbedaan dalam sikap, kepercayaan, nilai atau kebutuhan. Lihat Alo Liliweri, M.S. *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKIS, 2005, hlm. 146.

⁴ Douglas Hamilton Johnson. *The Root Causes of Sudan's Civil Wars: Peace Or Truce*. Kampala: Fountain Publisher, 2011, hlm. 39.

⁵ Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan yang dimiliki seorang atau sekelompok orang, untuk menentukan sikap terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapi dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Lihat Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1977, hlm. 32.

selatan untuk mendirikan badan legislatif dan eksekutif secara terpisah dari pemerintah pusat yang ada di utara.⁶

Akhir dari perang sipil yang kedua menandai awal era baru bagi perjalanan sejarah kedua wilayah yaitu utara dan selatan. Perang sipil kedua berhenti setelah terjadi kesepakatan antara pihak SPLM/A selaku tentara perjuangan dari wilayah selatan dengan wakil presiden pada saat itu yang mewakili pemerintahan utara. Kesepakatan antara kedua belah pihak tertuang dalam perjanjian CPA berisikan 7 point penting yang salah satu isinya membolehkan wilayah selatan untuk melakukan *referendum* setelah 6 tahun masa *interim* untuk menentukan apakah Sudan tetap menjadi satu negara atau wilayah selatan memilih untuk merdeka dan wilayah Sudan dibagi menjadi dua.⁷

Sudan Selatan memperoleh kemerdekaannya pada tanggal 9 Juli 2011 melalui hasil *referendum* yang dilaksanakan mulai tanggal 9 Januari 2011. Sebagian besar rakyat wilayah selatan memilih untuk memisahkan diri dari pemerintahan pusat Sudan dan mendirikan negara baru Sudan Selatan. Sebagai negara yang baru merdeka, banyak tantangan yang harus dihadapi oleh Sudan Selatan. Perbaikan ekonomi yang telah terpuruk karena perang berkepanjangan, kondisi sosial masyarakat yang harus diperbaiki, hingga konflik antar suku yang menyebabkan jutaan penduduk mengungsi dan ribuan korban meninggal dunia. Adanya permasalahan tersebut di atas menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti tentang Sudan Selatan pasca kemerdekaan.

B. Kajian Pustaka

Kepustakaan selalu diperlukan dan pasti dipergunakan untuk menulis karya ilmiah, terdiri dari buku-buku yang sebagian besar berfungsi sebagai acuan (*references book*), yaitu karya tulis yang digunakan untuk mencari di dalamnya hal yang perlu diketahui dan dicatat.⁸ Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau literatur yang menjadi landasan pemikiran dalam penelitian.⁹

Penelitian pada skripsi ini mempunyai empat rumusan masalah yaitu gambaran singkat geografis dan kebudayaan di Sudan Selatan, proses berdirinya negara Sudan Selatan yang dimulai pada periode 2005 sampai dengan 2011, kondisi Sudan Selatan setelah kemerdekaan serta upaya Sudan Selatan untuk membangun negara.

⁶ Marzuki Wahid dan Rumadi. *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 2001, hlm.145.

⁷ *Ibid.*

⁸ Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Depdikbud, 1996, hlm.21.

⁹ Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY: Jenis Penelitian Historis, Kualitatif, Kuantitatif dan PTK*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta, 2013, hlm. 3.

Rumusan masalah yang pertama yaitu gambaran singkat geografis dan kebudayaan di Sudan Selatan peneliti menggunakan buku yang berjudul *South Sudan the Bradt Travel Guide* karya Sophie dan Max Lovell-Hoare. Buku ini berisi tentang keadaan geografis dan kondisi masyarakat Sudan Selatan mulai dari kepercayaan, bahasa, musik, olahraga dan lain sebagainya.

Rumusan masalah yang kedua yaitu proses berdirinya negara Sudan Selatan yang dimulai pada periode 2005 sampai dengan 2011 peneliti menggunakan buku yang berjudul *South Sudan: From Revolution to Independence* karya Matthew LeRiche dan Matthew Arnold. Buku ini menjelaskan tentang perjuangan Sudan Selatan untuk memperoleh kemerdekaannya yang dimulai dari perang sipil pertama hingga proses kemerdekaan Sudan Selatan.

Rumusan masalah yang ketiga yaitu kondisi Sudan Selatan setelah kemerdekaan peneliti menggunakan buku yang berjudul *Hope, Pain and Patience*. Buku ini berisikan artikel dari beberapa peneliti yang materinya difokuskan pada nasib perempuan di Sudan Selatan.

Rumusan masalah yang keempat yaitu upaya Sudan Selatan membangun negara, peneliti menggunakan beberapa laporan/jurnal yang diterbitkan oleh organisasi internasional seperti Saveworld, Crisis Group dan yang lainnya. Laporan atau jurnal dari organisasi tersebut berisikan beberapa keterangan tentang upaya pembangunan dari segi infrastruktur di Sudan Selatan yang dibantu oleh Cina serta perkembangan ekonomi Sudan Selatan yang berpusat pada penghasilan minyak.

C. Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima langkah, yaitu: (1) *pemilihan topik*, merupakan penentuan masalah yang akan dikaji, (2) *heuristik*, yaitu pengumpulan sumber primer dan sekunder yang berkaitan dengan topik, (3) *verifikasi*, yakni mengkritik sumber sejarah dari keasliannya dan tingkat kebenaran informasi, (4) *interpretasi*, merupakan penafsiran terhadap fakta sejarah yang telah ditemukan, (5) *historiografi*, yaitu penulisan sejarah.

D. Pembahasan

1. Gambaran Singkat Kondisi Geografis dan Kebudayaan di Sudan Selatan

a. Geografis

Sudan Selatan adalah salah satu negara yang terletak di benua Afrika. Secara resmi Sudan Selatan merdeka pada tanggal 9 Juli 2011. Perjuangan yang panjang melalui perang saudara dengan negara Sudan selama puluhan tahun hingga akhirnya melakukan *referendum* pada Januari 2011.

Sudan Selatan secara resmi bernama Republik Sudan Selatan dengan Juba sebagai ibukotanya. Sesuai dengan nama yang disandang negara tersebut, bentuk pemerintahannya adalah republik. Sudan Selatan terbagi menjadi 10 pemerintahan administratif yaitu Central

Equatoria, Eastern Equatoria, Jonglei, Lakes, Northern Bahr el Ghazal, Unity, Upper Nile, Warrap, Western Bahr el Ghazal, Western Equatoria.

Negara termuda di benua Afrika ini berbatasan langsung dengan Ethiopia di sebelah timur, Kenya, Uganda dan Republik Demokratik Kongo di sebelah selatan, Republik Afrika Tengah di sebelah barat dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan negara Sudan.

Sudan Selatan memiliki berbagai macam suku yang sebagian besar hidup di wilayah pedesaan dengan latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Beberapa suku yang ada di Sudan Selatan adalah Dinka, Nuer, Kakwa, Bari, Azande, Shilluk, Kuku, Murle, Mandari, Diginga, Ndogo, Bviri, Lndi, Anuak, Bongo, Lango, Dungotona, Acholi. Beragamnya suku yang masih hidup di wilayah pedesaan mengakibatkan tingginya nilai dan aturan adat istiadat yang berlaku.

b. Kebudayaan

1) Bahasa

Sudan Selatan dengan banyaknya ragam suku dan bahasa tetap memiliki bahasa nasional yang diakui di seluruh negeri yaitu bahasa Inggris.¹⁰ Penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional tidak terlepas dari penjajahan bangsa Inggris pada wilayah mereka pada awal abad 19. Selain bahasa Inggris, beberapa masyarakat perkotaan di Sudan Selatan juga menggunakan bahasa Arab dalam keseharian mereka. Penggunaan bahasa Arab pada penduduk Sudan Selatan tidak terlepas dari sejarah bangsa tersebut yang sebelumnya bergabung dengan negara Sudan yang mayoritas beragama Islam dan berbahasa Arab.

Selain kedua bahasa tersebut, penduduk Sudan Selatan juga menggunakan bahasapribumi yang berkembang pada masing-masing suku. Bahasa pribumi di Sudan Selatan dikenal dengan jenis bahasa *Ubangi* yang tergolong ke dalam keluarga bahasa Niger-Kongo.¹¹ Suku Dinka sebagai pengguna bahasa *Ubangi* terbesar dengan jumlah 1,4 juta.¹²

2) Agama

Agama Kristen tercatat sebagai agama dengan penganut paling besar di Sudan Selatan. Tidak berbeda dengan perkembangan bahasa yang dipengaruhi oleh penjajahan bangsa Inggris, perkembangan agama Kristen juga dipengaruhi oleh hal tersebut.

¹⁰ International Business Publication. "Sudan South Doing Business, Investing And International Assistance in South Sudan Guide". *Strategic and Prantical Information*, Vol 1, 2013, hlm. 16

¹¹ *Ibid.*, hlm. 18.

¹² Sophie and Max Lovell-Hoare. *South Sudan the Bradt Travel Guide*. USA: The Globe Pequot Press, 2013, hlm. 19.

Missionaris Barat yang masuk ke Sudan Selatan pada pertengahan abad ke 19 dan mulai menyebarkan kepercayaan mereka kepada penduduk lokal.¹³

Agama lain yang berkembang selain agama Kristen adalah agama Islam. Seperti halnya dengan bahasa Arab, agama Islam yang berkembang di Sudan Selatan ketika mereka masih bergabung dengan wilayah Sudan.

Sebagian besar suku di Sudan Selatan yang hidup dipedesaan masih menganut kepercayaan tersebut. Suku di Sudan Selatan yang masih hidup di wilayah pedesaan percaya sangat percaya dengan adanya *totem* yang dipercaya sebagai simbol perlindungan.

2. Proses Berdirinya Negara Sudan Selatan

a. Comprehensive Peace Agreement

Sebelum Comprehensive Peace Agreement (CPA), beberapa upaya perdamaian pernah diusahakan oleh pemerintah Sudan dengan SPLM/A. Salah satu pihak yang membantu dalam perundingan perdamaian antara pemerintah Sudan dengan SPLM/A adalah IGAD.¹⁴ Seperti halnya yang tertuang dalam kalimat pembuka pada CPA bahwa GoS dan SPLM/A, telah melakukan pertemuan dan negosiasi yang berkelanjutan antara Mei 2002 dan Desember 2004, di Karen, Machakos, Nairobi, Nakuru, Nanyuki dan Naivasha-Kenya dibawah naungan IGAD.¹⁵

Negara-negara anggota IGAD berhasil membawa kedua pihak ke meja perundingan yang berakhir pada perjanjian perdamaian pada tahun 2005.¹⁶ CPA datang sebagai hasil dari keterlibatan badan-badan regional dan internasional seperti IGAD. Beberapa negara yang ikut mendukung CPA adalah pemerintah Norwegia, Jepang, Denmark, Italia, Belanda dan Amerika Serikat.¹⁷ Negara-negara ini telah mendukung kemajuan perdamaian melalui

¹³ *Ibid.*, hlm. 19.

¹⁴ IGAD adalah Otoritas Antar Pemerintah di Afrika Timus yang bergerak dibidang pembangunan yang didirikan pada tahun 1996 untuk menggantikan Intergovernmental Authority on Drought and Development (IGADD) yang didirikan pada tahun 1986. Lihat IGAD. 2010. Tersedia pada http://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=124&showall=1. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

¹⁵ Dijelaskan juga bahwa proses perdamaian dan isu-isu yang berhubungan daerah konflik seperti Kordofan Selatan, Blue Nile States dan wilayah Abyei berada dalam naungan pemerintah negara Kenya. Lihat *The Comprehensive Peace Agreement*. 2005. Tersedia pada <https://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/cpa-en.pdf>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

¹⁶ Andres Breidlid (ed). *A Concise History of South Sudan New and Revised Edition*. Kampala: Fountain Publisher, 2014, hlm. 324.

¹⁷ *Ibid.*

mekanisme diplomasi, pendanaan dan juga dengan mengerahkan tekanan pada dua faksi untuk mengakhiri perang berdarah.

CPA menghasilkan 8 poin penting yang nantinya akan diterapkan pada wilayah utara dan selatan. Berikut 8 poin yang disetujui pada CPA yang ditanda tangani pada 9 Januari 2005:

1. Masa *interim* akan dimulai, semua kewajiban dan komitmen yang ditentukan dalam CPA akan mengikat sesuai dengan ketentuan tersebut.
2. CPA harus terdiri dari teks-teks Protokol dan Perjanjian yang sudah ditandatangani bersama-sama, Perjanjian Gencatan Senjata Permanen dan Modalitas Keamanan Pengaturan Pelaksanaan sebagai Lampiran I dan Perjanjian tentang Modalitas Pelaksanaan dan Global Matrix Pelaksanaan sebagai Lampiran II
3. Teks Arab dan Inggris yang disepakati dari CPA akan baik menjadi resmi dan otentik. Namun, dalam terjadi perselisihan mengenai arti dari suatu ketentuan teks, dan hanya jika ada perbedaan dalam teks antara Arab dan teks bahasa Inggris; teks bahasa Inggris akan menjadi lebih baik yang digunakan sebagai bahasa perundingan perdamaian.
4. Setelah kompilasi dari teks Arab dan bahasa Inggris yang resmi dan otentik dari CPA, salinan diparaf kedua teks akan diberikan kepada kedua belah pihak, dan salinan juga harus diajukan kepada PBB, Uni Afrika, IGAD sekretariat di Djibouti, Liga Arab dan Republik Kenya.
5. Semua pihak yang menjalankan fungsi dalam pemerintahan akan terus melakukannya ditempat dimana mereka memberikan layanan tersebut atau melakukan fungsi tersebut kecuali atau sampai didistribusikan atau instruksi alternatif diterima sesuai dengan pengaturan disetujui oleh Para Pihak.
6. JNTT, ABC, Tim Tugas Konstitusi dan Tim Gabungan Teknis "New National Currency" diperlukan untuk memfasilitasi dan mempersiapkan operasionalisasi perjanjian, setelah perjanjian itu diberlakukan;
7. Mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan yang efektif dari Gencatan Senjata Permanen;
8. Mengambil langkah-langkah seperti yang diperlukan untuk memastikan bahwa sumber daya dan dana yang tersedia untuk pembentukan struktur, badan dan lembaga yang diatur oleh CPA terutama pembentukan Pemerintah Sudan Selatan;

b. Pelaksanaan Masa Interim

Pada masa *interim*, kedua pihak antara SPLM/A dan pemerintah Sudan berupaya untuk menemukan solusi dari berbagai masalah politik yang masih diperdebatkan. Mulai dari pendapatan minyak dan demarkasi perbatasan dari wilayah Abyei. Batas wilayah antara Sudan bagian utara dengan Sudan bagian Selatan Wilayah Abyei merupakan wilayah yang

masih menjadi konflik hingga saat ini. Secara teritorial, wilayah Abyei termasuk dalam wilayah Kordofan Selatan. Kordofan Selatan sebenarnya berada di bawah kendali Sudan, namun di tempat ini banyak ditinggali veteran perang saudara Sudan, terutama yang berasal dari Sudan Selatan.¹⁸ Wilayah ini terletak pada zona perbatasan antara wilayah Sudan dengan Sudan Selatan.

Wilayah Abyei selanjutnya diberikan hak khusus seperti yang tertuang dalam Prinsip Perjanjian Abyei. Penduduk wilayah Abyei juga akan menjadi penduduk dari Kordofan Barat (wilayah utara Sudan) dan Bahrul Ghazal (wilayah selatan Sudan). Sama halnya dengan wilayah selatan, wilayah Abyei juga direncanakan akan melaksanakan *referendum*. Perbedaan antara *referendum* wilayah selatan dengan Abyei adalah *referendum* wilayah selatan dilaksanakan untuk menentukan tetap bersatu dengan pemerintahan Sudan atau melepaskan diri dan mendirikan negara baru. Sedangkan *referendum* Abyei dilaksanakan untuk menentukan apakah Abyei ikut dalam pemerintahan Sudan di utara atau bergabung menjadi bagian dari wilayah selatan.¹⁹

Masa *interim* menjadi periode yang sangat menentukan bagi wilayah selatan. Otoritas setempat harus mulai mempersiapkan diri menuju dimulainya *referendum* yang akan menentukan nasib penduduk selatan untuk kedepannya. Permasalahan mengenai batas wilayah yang masih dipersengketakan dengan pemerintah di utara, krisis kemiskinan akibat perang puluhan tahun, serta masalah interen dengan pemberontak yang tidak puas dengan kepemimpinan Kiir harus segera diselesaikan.

c. Referendum Sudan Selatan

1) Proses Jalannya Referendum Sudan Selatan

Referendum akan dilakukan sesuai dengan CPA yang dicapai tahun 2005, yang mengakhiri perang saudara selama 21 tahun antara pemerintah Sudan dengan SPLM/A yang menewaskan lebih dari dua juta orang. Penduduk di wilayah Selatan melakukan *referendum* yang menentukan apakah mereka akan terlepas atau tetap bergabung dengan Utara.²⁰ Terlepas berarti wilayah Selatan akan membentuk pemerintahan baru tanpa

¹⁸ PBB Selidiki Bentrok Berdarah di Sudan. 2011. Tersedia Pada http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/06/110605_unsudanprobe. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

¹⁹ Ted Dagne. Sudan: The Crisis In Darfur And Status Of The North-South Peace Agreement. *Congressional Reserach Service*. 2008, hlm. 10. Tersedia pada fpc.state.gov/documents/organization/109541.pdf. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2015.

²⁰ Referendum Sudan Selatan dimulai. 2011. Tersedia pada http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/01/110109_souhsudanpool. Diakses pada tanggal 16 September 2015

campur tangan dari pemerintah Khartoum diutara. Wilayah selatan akan memiliki otoritas penuh untuk mengatur wilayah mereka, dan berdiri sendiri sebagai suatu negara yang berdaulat. Bergabung berarti wilayah Selatan akan tetap menjadi bagian dari negara Sudan tanpa memiliki otoritas untuk mengatur wilayahnya sendiri.

Sudan Selatan memulai *referendum* pada tanggal 9 Januari 2011. Penduduk Selatan mulai mendatangi tempat pemungutan suara yang nantinya akan menghasilkan keputusan apakah tetap menjadi bagian dari wilayah Sudan atau memisahkan diri menjadi negara baru. Tiga hari setelah dimulainya *referendum*, Komisi *Referendum* menyebutkan sudah 20 persen pemilih terdaftar yang memberikan suaranya di tempat-tempat pemungutan suara yang dibuka satu jam lebih lama karena membludaknya antusiasme warga.²¹ Penduduk selatan memang telah lama menunggu terjadinya *referendum* tersebut. Antusias yang tinggi menyambut masa depan baru bagi penduduk wilayah selatan yang telah lama terbelenggu oleh pemerintah Khartoum diutara.

2) Hasil Referendum Sudan Selatan

Referendum wilayah selatan telah mencapai puncaknya. *Referendum* yang berlangsung pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Januari 2011 telah berakhir. Proses jalannya *referendum* memang memiliki banyak gangguan, akan tetapi penduduk wilayah selatan tetap fokus dan optimis pada hasil positif yang nantinya akan membawa mereka pada masa depan yang baru.

Sebagian besar penduduk wilayah selatan telah melakukan pemilihan pada tempat pemilihan yang disediakan oleh Komisi *Referendum*. Sekitar 98,83% memilih untuk berpisah dari pemerintah diutara dan 1,17 memilih untuk tetap bergabung dengan wilayah negara Sudan.²² Selanjutnya pada bulan Februari 2011, SPLM memutuskan bahwa negara baru dari wilayah selatan akan diberi nama Republik Sudan Selatan.²³

3. Kondisi Sudan Selatan Pasca Merdeka

a. Pendidikan

Kondisi pasca perang sipil memaksa banyak dari anak-anak Sudan Selatan yang putus sekolah, akibatnya tingkat kemampuan membaca pada penduduk Sudan Selatan sangat

²¹ Hari ke-tiga Referendum Diwarnai Bentrok. 2011. Tersedia pada http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/01/110111_sudanref3rdday. Diakses pada tanggal 16 September 2015

²² Results for the Referendum of Southern Sudan. 2011. Tersedia pada <http://southernsudan2011.com/index.html>. Diakses pada tanggal 17 September 2015.

²³ Ted Dagne. Sudan: The Crisis In Darfur And Status Of The North-South Peace Agreement. *Congressional Reserach Service*. 2011, hlm. 4. Tersedia pada <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33574.pdf>. Diakses pada 9 September 2015.

rendah. Tingkat Jumlah penduduk Sudan Selatan yang sudah mampu membaca diperkirakan sekitar 27 persen dari total penduduk Sudan Selatan yang berusia lebih dari 15 tahun.²⁴

Kondisi pendidikan Sudan Selatan mulai membaik setelah penandatanganan CPA oleh pemerintah Sudan dengan SPLM/A. Sejak tahun 2005, pendaftaran sekolah pada semua jenjang pendidikan telah meningkat, dengan pendaftaran sekolah dasar tumbuh sebesar 20% per tahun. Proses perbaikan pada sistem pendidikan di Sudan Selatan mendapatkan bantuan dari dari berbagai pihak.

Tenaga pengajar sebagai subjek dari proses belajar mengajar masih belum begitu diperhatikan. Jumlah pengajar yang ada di Sudan Selatan juga sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sering terjadi keterlambatan gaji kepada pengajar ditambah lagi kondisi Sudan Selatan yang masih berkecamuk. Akibat perang antar suku memaksa para pengajar untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman.²⁵ Tidak cukupnya gaji yang mereka peroleh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari membuat para pengajar di Sudan Selatan beralih profesi yang lebih menjanjikan secara materi.

Kurangnya infrastruktur pendidikan, fasilitas pendidikan dasar yang masih belum diakses oleh semua terus memacu pemerintah Sudan Selatan untuk membentuk pendidikan yang lebih baik.²⁶ Pada tahun 2012 pemerintah Sudan Selatan mengeluarkan peraturan mengenai Pendidikan yang menjelaskan bahwa pendidikan harus bebas dan dapat diakses oleh semua warga negara Sudan Selatan tanpa diskriminasi atas dasar jenis kelamin, suku, ras, agama, dan kesehatan/cacat. Hasilnya pada tahun 2013 sekitar 41,5 persen anak-anak Sudan Selatan sudah mulai menikmati fasilitas pendidikan.

Tujuan Sudan Selatan untuk memperoleh pendidikan yang baik untuk penduduknya harus tertunda karena konflik antar suku yang dimulai pada tahun 2013 akhir. Akar sejarah pendidikan yang buruk akibat perang sipil harus kembali terulang ketika pecah perang suku di Sudan Selatan. Bangunan sekolah di wilayah Sudan Selatan banyak yang sudah hancur akibat perang antar suku yang masih terus berlanjut hingga saat ini.

²⁴ Daniel Ness and Chia-Ling Lin. *International Education An Encyclopedia Of Contemporary Issues And Systems*. New York: Routledge, 2015, hlm. 372.

²⁵ James Copnal. *Amid Conflict and Poverty, This School In South Sudan Is An Unlikely Success*. 2014. Tersedia pada <http://theguardian.com/global-development/2014/oct/28/south-sudan-exel-academy-school-success>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.

²⁶ Banyak infrastruktur sekolah yang tidak memadai. Hanya sekitar 23% bangunan sekolah yang menggunakan konstruksi permanen, selebihnya hanya dibuat seadanya saja. Jumlah buku yang tersedia untuk peserta didik juga sangat sedikit. Lihat International Development Committee. *South Sudan: Prospects for Peace and Development*. London: House of Commons, 2012, hlm. 20. Tersedia pada <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmintdev/1570/1570.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.

b. Kondisi Perempuan Sudan Selatan

Pada hakekatnya perempuan dan anak perempuan di Sudan Selatan memiliki tugas untuk memasak, bertani, membersihkan rumah, mengumpulkan kayu bakar, membuatkan bir, mengurus anak serta melayani suaminya dalam kebutuhan biologis. Sedangkan laki-laki memiliki tugas sebagai penanggung jawab dan kepala keluarga yang menafkahi keluarganya serta pembuat keputusan untuk kepentingan keluarga dan masyarakat.²⁷ Perempuan harus tunduk dan patuh kepada laki-laki yang memegang otoritas tertinggi dalam suatu keluarga. Peran dan posisi perempuan Sudan Selatan hanya terfokus kepada pekerjaan rumah tangga dan membesarkan anak-anak mereka.²⁸

Pernikahan pada usia dini sering terjadi di Sudan Selatan. Keluarga kadang-kadang memberikan anak perempuan mereka atas pernikahan untuk mendapatkan keuntungan dari mahar pengantin putri yang diberikan oleh calon pengantin pria.²⁹ Sekitar 41% anak perempuan Sudan Selatan menikah pada usia 16 sampai dengan 18 tahun.³⁰ Pernikahan perempuan Sudan Selatan juga terjadi pada usia yang masih sangat muda. Anak perempuan Sudan Selatan yang menikah dibawah usia 15 tahun berjumlah sekitar 7%.

Selain kekerasan dalam rumah tangga, perempuan Sudan Selatan juga kerap menjadi korban pelecehan seksual dan tindak pemerkosaan. Korban akan merasa malu apabila mengakui dirinya adalah korban dari pelaku pemerkosaan. Mereka memilih diam dan melakukan aborsi yang tidak jarang ikut merenggut nyawa mereka.

c. Kondisi Politik Sudan Selatan

Sudan Selatan sebagai negara yang baru saja merdeka belum mampu berdiri sendiri untuk memperbaiki kondisi penduduknya dan masih membutuhkan bantuan dari berbagai pihak termasuk badan Internasional untuk memulihkan kondisi pasca perang sipil yang menewaskan ribuan korban jiwa. Organisasi PBB yang bertugas membantu pemulihan di Sudan Selatan adalah DDR. Bantuan yang diberikan oleh DDR bertujuan untuk membantu pemerintah Sudan Selatan dalam mengatasi buruknya tingkat pendidikan, pelayanan kesehatan yang masih kurang, lapangan pekerjaan yang belum mampu menjangkau seluruh

²⁷ CARE. *South Sudan Gender In Brief*. 2013, hlm. 1-2. Tersedia pada <http://www.care.org/sites/default/files/documents/Gender%20in%20Brief%20South%20Sudan%20.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.

²⁸ Orly Stren. 'This is how marriage happens sometimes': Women and marriage in South Sudan. Dalam (ed) Friederike Bubenzer dan Orly Stern. *Hope, Pain & Patience The Lives of Women in South Sudan*. Auckland Park: Jacana Media. 2011, hlm. 1.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁰ International Development Committee. *op.cit.*, hlm. 22-23.

penduduk Sudan Selatan, hingga perbaikan nasib bagi perempuan dan anak-anak di Sudan Selatan.

Pemberian bantuan dari PBB sepertinya tidak diimbangi dengan pemerintahan yang baik di Sudan Selatan. Carut marut dan konflik para elit penguasanya belum mampu diatasi oleh pemerintah. Hingga pada puncaknya meletus perang antar suku dinegara tersebut pada penghujung tahun 2013. Perayaan dua tahun lahirnya negara Sudan Selatan yang seharusnya berjalan dengan meriah seperti saat pertama kali negara ini lahir harus berubah mencekam.

Juli 2013 Sudan Selatan sudah berusia 2 tahun. Situasi dan kondisi negara yang tidak aman membuat perayaan ulang tahun jauh dari harapan. Penduduk Sudan Selatan tidak lagi merasakan kebahagiaan seperti ketika negara ini baru saja lahir. Konflik yang terjadi tidak lain dikarenakan terjadi perselisihan antara Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir dengan mantan wakil Presidennya Riek Machar. Pemerintahan Kiir telah mampu memenuhi harapan rakyat Sudan Selatan untuk merdeka setelah perang saudara puluhan tahun melawan pemerintahan Sudan diutara. Perang saudara yang berakhir dengan CPA pada tahun 2005 yang selanjutnya mengatur penduduk Sudan Selatan untuk melaksanakan *referendum*.

1) Perang Antar Suku

Machar selanjutnya menyatakan dirinya sebagai pemimpin gerakan oposisi bersenjata yaitu SPLM/A Oposisi. Pasukan SPLM/A yang pada perang saudara melawan pemerintahan Sudan banyak yang berasal dari suku Nuer, suku dimana asal Machar lahir. Tidak mengherankan apabila banyak dari pasukan SPLM/A yang membelot pemerintah dan bergabung dengan Machar.

Perselisihan antara Salva Kiir sebagai Presiden dan mantan wakil Presiden Riek Machar telah meluas menjadi perselisihan antar suku. Salva Kiir lahir dan dibesarkan dari Suku Dinka, suku mayoritas di Sudan Selatan. Sedangkan Machar lahir dan dibesarkan dari suku Nuer yang merupakan suku kedua terbesar setelah Dinka. Sebelum terjadi ketegangan, Dinka dan Nuers adalah dua suku yang sangat rukun. Dinka dan Nuers menjalin kerjasama, hidup berdampingan dan beberapa ada yang melangsungkan pernikahan antar kedua suku ini.

Melihat peta kekuatan antara Dinka dan Nuer, suku Dinka sedikit lebih unggul jika dilihat dari segi persenjataan. Banyak dari tentara Sudan Selatan dibawah naungan SPLM/A yang berasal dari suku Dinka. Secara tidak langsung Dinka dibantu oleh pihak pemerintah dengan berbagai perlengkapan persenjataan. Anggaran pemerintah untuk

militer sebesar 25% semakin menguatkan dukungan pemerintah kepada kelompok yang membela Kiir.³¹

2) Dampak Perang Antar Suku

a) Ekonomi

Perang antar suku mengakibatkan produksi minyak di Sudan Selatan melemah. Ekonomi Sudan Selatan yang sebagian besar digerakkan oleh minyak harus terhenti akibat perang antar suku. Ketergantungan Sudan Selatan pada hasil produksi minyak sangat tinggi. Akibatnya apabila produksi minyak mengalami kendala, pemerintah Sudan Selatan akan mengalami banyak kerugian akibat terhentinya produksi minyak. Pendapatan dari sektor lain tidak mampu untuk menandingi banyaknya pendapatan yang diperoleh dari produksi minyak.

Banyak pasar yang tidak beroperasi dikarenakan situasi yang belum aman. Penduduk Sudan Selatan tidak mampu untuk berbelanja karena kemiskinan dan akibatnya banyak dari penduduk yang menjarah gudang penyimpanan bantuan.³² Kelaparan dan keterlambatan distribusi bantuan makanan memaksa penduduk melakukan penjarahan dan pencurian bahan makanan pada gudang-gudang penyimpanan. Pemerintah Sudan Selatan hanya mengandalkan bantuan pinjaman uang dari berbagai pihak untuk kelangsungan hidup penduduknya, walaupun sudah dijelaskan sebelumnya bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk penduduknya tidak sampai 10% dari seluruh anggaran belanja negara.³³

Penduduk yang dilanda kemiskinan akibat terganggunya mata pencaharian tidak mampu untuk membeli bahan makanan. Proses bercocok tanam, pergi mencari ikan hingga berternak masih belum bisa dilakukan karena kondisi Sudan Selatan yang belum aman. Harga pangan di wilayah ini tinggi dan cenderung menjadi lebih jauh dari jangkauan banyak dari mereka yang mata pencaharian telah terganggu oleh ketidakstabilan politik.

³¹ David Smith. *South Sudan: Death of Dream*. 2014. Tersedia pada <http://www.theguardian.com/world/2014/jan/20/south-sudan-death-of-a-dream>. Diakses pada tanggal 4 November 2015.

³² 3, 7 Juta Warga Sudan Selatan Kekurangan Pangan. 2014. Tersedia pada http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/02/140202_southsudanemergency. Diakses pada tanggal 4 November 2015.

³³ Pada bulan Desember 2014, IMF melaporkan bahwa Sudan Selatan telah meminjam uang sebesar \$ 1 Miliar dengan pemberian secara bertahap. Tahap pertama Sudan Selatan menerima uang sebesar \$ 328.000.000 yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan minyak asing yang beroperasi di Sudan Selatan. Setidaknya \$ 59.000.000 dialokasikan untuk pembelian senjata di paruh pertama 2014, sementara \$ 158.000.000 digunakan untuk proyek konstruksi di kota Juba. Lihat *Ibid*.

b) Kesehatan

Selain bencana kelaparan dan kemiskinan yang diakibatkan oleh perang antar suku. Penduduk Sudan Selatan juga dihadapkan pada wabah penyakit yang mulai menyebar dan merenggut nyawa sebagian besar dari mereka. Para pejabat kesehatan memperingatkan bahwa wabah kolera telah menyebar di ibukota Sudan Selatan yang telah menewaskan 23 orang dan lebih dari 670 orang harus menerima perawatan.³⁴

Selain wabah penyakit kolera, penyakit lain yang mulai diderita oleh penduduk Sudan Selatan adalah TBC, HIV/Aids, gizi buruk dan lain sebagainya. Tercatat 200 orang meninggal di tenda pengungsian PBB, termasuk anak-anak yang meninggal karena kurang gizi dan berbagai penyakit lainnya.³⁵ Kedua belah pihak mulai menyerang dan menculik perempuan serta anak-anak yang ditinggalkan oleh suami dan saudara mereka untuk kepentingan perang. HIV/Aids merupakan salah satu penyebab utama kematian diantara pengungsi, karena akses pengobatan dan kesehatan harus terganggu oleh pasukan bersenjata. Virus HIV/Aids dengan cepat menyebar karena tingginya kejahatan seksual yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun oposisi.³⁶

4. Upaya Sudan Selatan Untuk Membangun Negara

a. Peran Cina Dalam Pembangunan di Sudan Selatan

Pasca kemerdekaan pembangun ekonomi di Sudan Selatan mulai dilaksanakan. Menyadari banyak keterbatasan dalam peralatan dan keuangan yang melanda Sudan Selatan membuat pemerintahnya membuka diri untuk investor dan perusahaan asing yang ingin menanamkan modalnya dinegara tersebut. Salah satu negara yang paling berpengaruh dalam pembangunan Sudan Selatan adalah Cina.

Setelah pemisahan Sudan Selatan pada tahun 2011, Cina tetap mengadakan kerjasama dengan kedua negara baik Sudan maupun Sudan Selatan secara terpisah dengan tujuan untuk menghormati kedaulatan negara dan untuk membantu kedua belah pihak untuk

³⁴ IRIN. *South Sudan capital faces worsening cholera outbreak*. 2014. Tersedia pada <http://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/04/south-sudan-faces-cholera-outbreak>. Diakses pada tanggal 4 November 2015.

³⁵ Amanda Puspita Sari. *Empat Juta Orang Kelaparan di Sudan Selatan*. 2014. Tersedia pada <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140910145852-127-2965/empat-juta-orang-kelaparan-di-sudan-selatan/>. Diakses pada tanggal 4 November 2015.

³⁶ Sam Jones. *South Sudan: little to celebrate as war and hunger mar independence day*. 2014. Tersedia pada <http://www.theguardian.com/global-development/2014/jul/09/south-sudan-famine-conflict-independence-day>. Diakses pada tanggal 4 November 2015.

mengembangkan ekonomi.³⁷ Peran Cina dalam pembangunan ekonomi Sudan Selatan Kemerdekaan Sudan Selatan telah menandai titik balik penting dalam sejarah politik.

Kerjasama antara Cina dengan Sudan Selatan meliputi tiga bidang yaitu ekonomi, infrastruktur dan pendidikan.³⁸ Ketiga bidang ini menjadi sasaran penting bagi kerjasama antara kedua negara karena wilayah Sudan Selatan yang masih banyak mengalami kerusakan akibat perang dengan pemerintah Sudan.

b. Perkembangan Ekonomi Sudan Selatan

Sudan Selatan adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di benua Afrika. Kilang-kilang minyak yang berada di wilayah perbatasan dengan negara Sudan mengharuskan hasil minyak harus dibagi dua dengan negara Sudan. Salah satu dampak dari terbaginya hasil minyak adalah penutupan produksi minyak oleh Sudan.

Ekonomi yang belum stabil mengakibatkan Sudan Selatan mengalami inflasi yang cukup besar. Tercatat pada tahun 2011 Sudan Selatan mengalami inflasi sebesar 39,4% dan akan terus meningkat hingga tahun 2012.³⁹ Harga bahan pokok mulai naik tajam akibat inflasi yang tinggi. Pada bulan Juni 2012, untuk menanggulangi inflasi pemerintah menyetujui program reformasi yang komprehensif untuk mendevalusi nilai tukar sebesar 66%, mengurangi subsidi BBM, memotong pengeluaran non-prioritas dan memperkuat jaring pengaman sosial.⁴⁰

Pemerintah Sudan Selatan bergerak cepat untuk memperbaiki perekonomian negaranya pasca kemerdekaan. Pemerintah selanjutnya mengeluarkan program nasional yang menetapkan agenda jangka menengah untuk pembangunan yang tertuang dalam SSDP. SSDP bertujuan untuk mewujudkan kebebasan, kesetaraan, keadilan, perdamaian dan kemakmuran bagi semua penduduk Sudan Selatan.⁴¹

³⁷ Dr Zhang Chun. "China's relations with two Sudans: From one country, two systems to two countries, one system". Dalam Safeworld Report. *Oil, security and community engagement*. 2013, hlm. 7. Tersedia pada <http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/754-oil-security-and-community-engagement>. Diakses pada tanggal 2 November 2015.

³⁸ Professor Wang Hongxu. "China and South Sudan: a strategic partnership?". *Safeworld*. 2013, hlm. 4. Tersedia pada <http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/754-oil-security-and-community-engagement>. Diakses pada tanggal 2 November 2015.

³⁹ International Business Publication. *op.cit.*, hlm. 69.

⁴⁰ Toru Nishiuchi. *Oil Depletion and Adjusted Net Savings in Sudan and South Sudan*. 2013, hlm. 4. Tersedia pada [https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/documents/Sudans%20Oil%20Depletion%20%26%20ANS%20\(Final%20Feb%202013\).pdf](https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/documents/Sudans%20Oil%20Depletion%20%26%20ANS%20(Final%20Feb%202013).pdf). Diakses pada tanggal 2 November 2015.

⁴¹ International Business Publication. *op.cit.*, hlm. 45-46.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sudan Selatan secara resmi bernama Republik Sudan Selatan dengan Juba sebagai ibukotanya. Sesuai dengan nama yang disandang negara tersebut, bentuk pemerintahannya adalah republik. Sudan Selatan terbagi menjadi 10 pemerintahan administratif yaitu Central Equatoria, Eastern Equatoria, Jonglei, Lakes, Northern Bahr el Ghazal, Unity, Upper Nile, Warrap, Western Bahr el Ghazal, Western Equatoria. Sudan Selatan jika dilihat dari peta dunia, tidak mempunyai wilayah lautan. Hampir sebagian besar luas wilayahnya terdiri dari daratan. Hal ini tidak menjadikan wilayah Sudan Selatan sebagai wilayah yang tandus karena pada beberapa negara bagian di Sudan Selatan dilalui oleh sungai Nil yang mengalir pada sebagian negara di Afrika.
2. Sebelum merdeka, Sudan Selatan pernah mengalami dua kali perang saudara dengan pemerintahan pusat di Sudan. Perang sipil pertama terjadi pada tahun 1956-1972 dan perang sipil kedua terjadi antara tahun 1983-1005. Perang sipil yang kedua berakhir dengan ditanda tangannya perjanjian damai antara pemerintah Sudan dengan SPLM/A yang tertuang dalam Comprehensive Peace Agreement (CPA). CPA selanjutnya menjadi titik balik bagi wilayah selatan untuk bangkit dari keterpurukan akibat perang yang sangat lama. Pada perjanjian tersebut diterangkan bahwa wilayah selatan berhak melakukan *referendum* setelah melakukan 6 tahun masa *interim*. Masa *Interim* mulai diperlakukan pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2011.
3. Pasca Kemerdekaan kondisi pendidikan dan perempuan di Sudan Selatan masih sangat memprihatinkan. Banyak dari penduduk Sudan Selatan yang masih buta huruf. Kondisi perempuan lebih miris dengan banyaknya pelecehan seksual, pemerkosaan dan kekerasan dalam rumah tangga mereka. Posisi perempuan Sudan Selatan sangat lemah ditingkat adat istiadat dan peradilan hukum. Hal ini mengakibatkan perempuan Sudan Selatan sangat mudah untuk direndahkan martabatnya.
4. Hubungan kerjasama antara Cina dengan Sudan Selatan pasca kemerdekaan tanggal 9 Juli 2011 dimulai dengan penandatanganan pengakuan berdirinya Sudan Selatan sebagai negara merdeka oleh perwakilan pemerintah Cina yaitu Jiang Weixin. Pemerintah Sudan Selatan lebih memilih Cina dari pada bangsa Barat sebagai mitra pembangunan mereka pasca kemerdekaan karena perdamaian Cina lebih menekankan pada pembangunan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur dan pengentasan kemiskinan. Bangsa Barat dianggap gagal dalam program pembangunan pasca konflik, disisi lain Cina berhasil dalam pembangunan ekonomi dalam negerinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- [1] Alo Liliweri, M.S. 2005. *Prasangka & Konflik: Komunikasi Lintas Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKIS.
- [2] Andres Breidlid (ed). 2014. *A Concise History of South Sudan New and Revised Edition*. Kampala: Fountain Publisher.
- [3] Daniel Ness and Chia-Ling Lin. 2015. *International Education An Encyclopedia Of Contemporary Issues And Systems*. New York: Routledge
- [4] Douglas Hamilton Johnson. 2011. *The Root Causes of Sudan's Civil Wars: Peace Or Truce*. Kampala: Fountain Publisher.
- [5] Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Jakarta: Depdikbud, 1996, hlm.21.
- [6] International Business Publication. "Sudan South Doing Business, Investing And International Assistance in South Sudan Guide". *Strategic and Prantical Information*, Vol 1, 2013.
- [7] Marzuki Wahid dan Rumadi. 2001. *Fiqh Madzhab Negara Kritik atas Politik Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- [8] Taufik Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean. 2004. *Politik Syariat Islam dari Indonesia hingga Nigeria*. Jakarta: IKAPI.
- [9] Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY: Jenis Penelitian Historis, Kualitatif, Kuantitatif dan PTK*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta.

Artikel/ Bab dalam Buku:

- [1] Orly Stren. 2011. This is how marriage happens sometimes': Women and marriage in South Sudan. Dalam (ed) Friederike Bubenzer dan Orly Stern. *Hope, Pain & Patience The Lives of Women in South Sudan*. Auckland Park: Jacana Media.

Internet:

- [1]3, 7 Juta Warga Sudan Selatan Kekurangan Pangan. 2014. Tersedia pada http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/02/140202_southsudanemergency. Diakses pada tanggal 4 November 2015.
- [2]Amanda Puspita Sari. *Empat Juta Orang Kelaparan di Sudan Selatan*. 2014. Tersedia pada <http://www.cnnindonesia.com/internasional/20140910145852-127-2965/empat-juta-orang-kelaparan-di-sudan-selatan/>. Diakses pada tanggal 4 November 2015.
- [3]CARE. *South Sudan Gender In Brief*. 2013. Tersedia pada <http://www.care.org/sites/default/files/documents/Gender%20in%20Brief%20South%20Sudan%20.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.
- [4]David Smith. *South Sudan: Death of Dream*. 2014. Tersedia pada <http://www.theguardian.com/world/2014/jan/20/south-sudan-death-of-a-dream>. Diakses pada tanggal 4 November 2015.
- [5]Dr Zhang Chun. 2013. "China's relations with two Sudans: From one country, two systems to two countries, one system". Dalam Safeworld Report. *Oil, security and community engagement*.

- Tersedia pada <http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/754-oil-security-and-community-engagement>. Diakses pada tanggal 2 November 2015.
- [6] Hari ke-tiga Referendum Diwarnai Bentrok. 2011. Tersedia pada http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/01/110111_sudanref3rdday. Diakses pada tanggal 16 September 2015
- [7] IGAD. 2010. Tersedia pada http://igad.int/index.php?option=com_content&view=article&id=93&Itemid=124&showall=1. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2015
- [8] International Development Committee. 2012. *South Sudan: Prospects for Peace and Development*. London: House of Commons. Tersedia pada <http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmintdev/1570/1570.pdf>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.
- [9] IRIN. 2014. *South Sudan capital faces worsening cholera outbreak*. Tersedia pada <http://www.theguardian.com/global-development/2014/jun/04/south-sudan-faces-cholera-outbreak>. Diakses pada tanggal 4 November 2015.
- [10] James Copnal. 2014. *Amid Conflict and Poverty, This School In South Sudan Is An Unlikely Success*. Tersedia pada <http://theguardian.com/global-development/2014/oct/28/south-sudan-exel-academy-school-success>. Diakses pada tanggal 3 Oktober 2015.
- [11] PBB Selidiki Bentrok Berdarah di Sudan. 2011. Tersedia Pada http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/06/110605_unsudanprobe. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2015
- [12] Professor Wang Hongxu. 2013. "China and South Sudan: a strategic partnership?". *Safeworld*. Tersedia pada <http://www.saferworld.org.uk/resources/view-resource/754-oil-security-and-community-engagement>. Diakses pada tanggal 2 November 2015.
- [13] *Protokol Abyei antara pemerintah Sudan dengan SPLM/A*. 2004. Tersedia pada www.sudantribune.com/IMG/pdf/20040527_abyei_protocol.pdf. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2015.
- [14] Referendum Sudan Selatan dimulai. 2011. Tersedia pada http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2011/01/110109_souhsudanpool. Diakses pada tanggal 16 September 2015
- [15] Results for the Referendum of Southern Sudan. 2011. Tersedia pada <http://southernsudan2011.com/index.html>. Diakses pada tanggal 17 September 2015.
- [16] Sam Jones. 2014. *South Sudan: little to celebrate as war and hunger mar independence day*. Tersedia pada <http://www.theguardian.com/global-development/2014/jul/09/south-sudan-famine-conflict-independence-day>. Diakses pada tanggal 4 November 2015.
- [17] Ted Dagne. 2011. *Sudan: The Crisis In Darfur And Status Of The North-South Peace Agreement. Congressional Reserach Service*. Tersedia pada <https://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33574.pdf>. Diakses pada 9 September 2015.
- [18] *The Comprehensive Peace Agreement*. 2005. Tersedia pada <https://unmis.unmissions.org/Portals/UNMIS/Documents/General/cpa-en.pdf>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2015

[19]Toru Nishiuchi. 2013. *Oil Depletion and Adjusted Net Savings in Sudan and South Sudan*. Tersedia pada

[https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/documents/Sudans%20Oil%20Depletion%20%26%20ANS%20\(Final%20Feb%202013\).pdf](https://www.wavespartnership.org/sites/waves/files/documents/Sudans%20Oil%20Depletion%20%26%20ANS%20(Final%20Feb%202013).pdf). Diakses pada tanggal 2 November 2015.

[20]What Is DDR. Tersedia pada http://www.unddr.org/what-is-ddr/introduction_1.aspx. Diakses pada tanggal 30 November 2015.

Penguji Utama



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001.

Yogyakarta, 17 Maret 2016

Menyetujui,
Pembimbing



Rr. Terry Irenewaty, M. Hum.
NIP. 19560428 198203 2 003